



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/164/K/411.013/2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022-2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

*dl*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten Nganjuk;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.013/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022-2025.

KESATU Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender  
(PUG) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2025 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

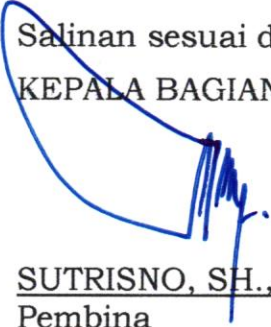
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dl*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/164/K/411.013/2022  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN 2022-2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan adalah salah satu strategi pemberdayaan perempuan yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Melalui Inpres tersebut diamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Sehingga harapannya adalah bahwa setiap warga negara mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya dan hasil pembangunan. Selanjutnya pelaksanaan PUG diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Selain dasar hukum yang melandasi, indikator lain yang menunjukkan komitmen daerah dalam melaksanakan PUG dapat dilihat dari besaran anggaran responsif gender. Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang responsif gender. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian, yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Kabupaten Nganjuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun Peraturan daerah tentang gender diterbitkan pada tahun 2020 komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya.

Hal ini terbukti bahwa capaian kinerja pengarusutamaan gender yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai nilai 93,26 di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 93,76. Capaian tersebut diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Untuk mempercepat keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Nganjuk, pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan dorongan dan memfokuskan program/kegiatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG). RAD-PUG ini untuk memberikan sinergi terhadap program unggulan kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 termasuk perubahannya.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) adalah tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

### b. Tujuan

Sedangkan tujuan secara umum dari Kegiatan RAD-PUG disusun untuk menjadi panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan.

## 1.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kabupaten Nganjuk.

dl.

- b. Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan di Kabupaten Nganjuk.
- c. Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di Perangkat Daerah/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Nganjuk.
- d. Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/kegiatan di Perangkat Daerah/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Nganjuk.
- e. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Perangkat Daerah/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

#### 1.4. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

dh

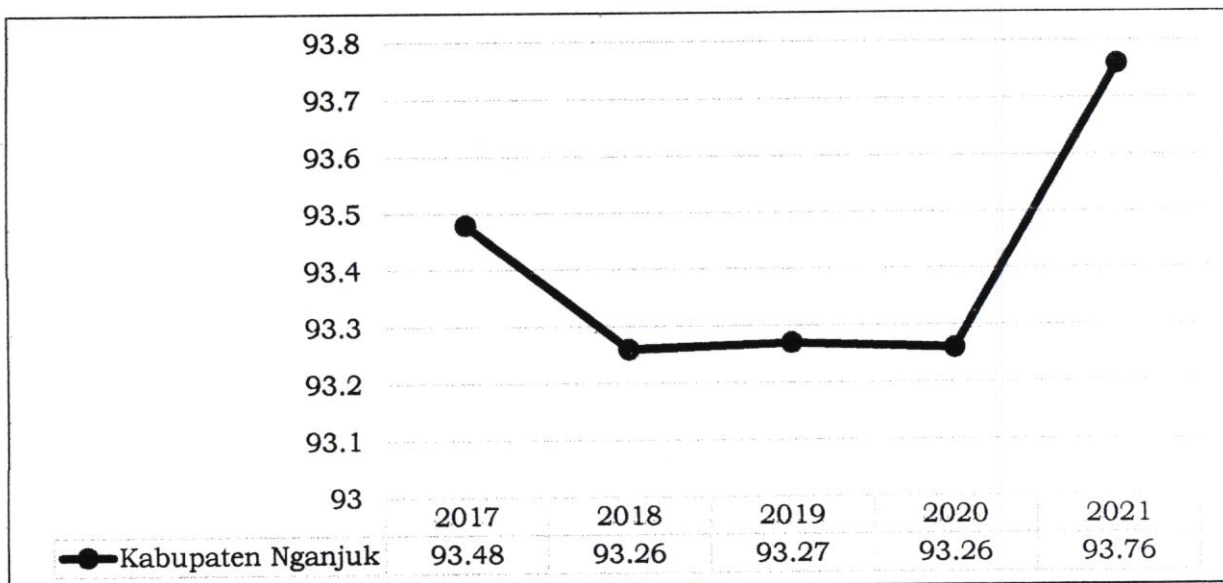
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*) Kabupaten Nganjuk; dan
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.013/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk.

## BAB II ANALISIS SITUASI

Indeks IPG adalah indikator yang menggambarkan tingkat keadilan dan kesetaraan gender. Nilainya merupakan perbandingan (rasio) antara capaian IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Indeks (HDI)* pada tahun 2010. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama seimbang. Berikut data capaian indikator pembangunan Gender di Kabupaten Nganjuk.

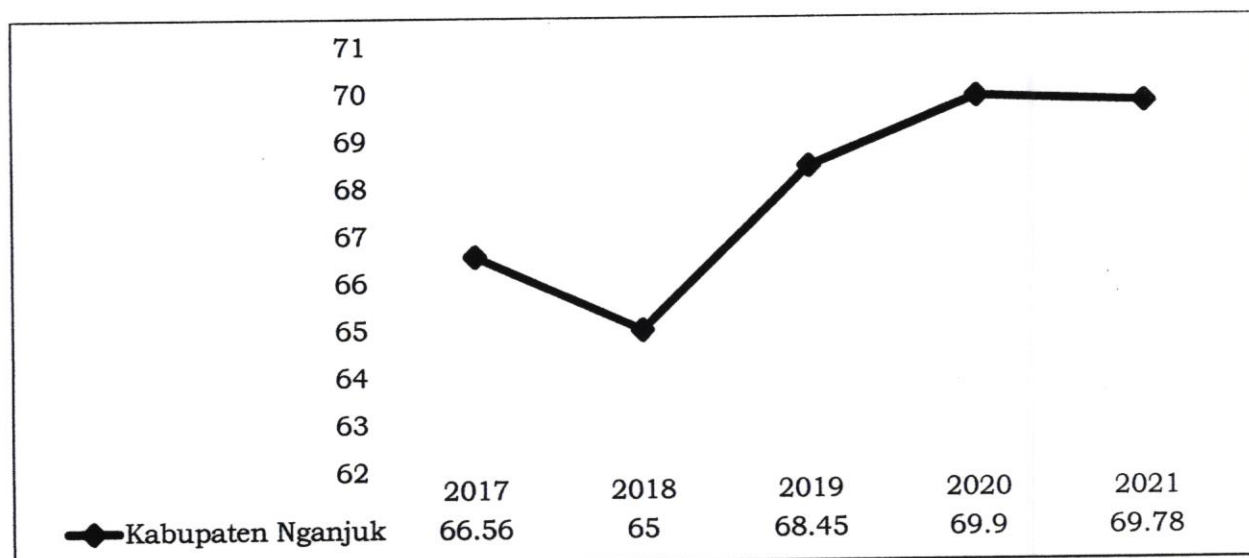
GRAFIK 2.1.  
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

GRAFIK 2.2.  
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.1. Bidang Kesehatan

2.1.1. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.1.  
INDIKATOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2018 – 2021

NO.	JENJANG	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	92	92,31	100,00	24,00
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	95,2	59,57	83,47	245,5
3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	7,75	6,75	8,14	5,81
4	Prevalensi Stunting pada Balita	16,13	11,56	9,41	11,9
5	Persentase Desa /Kelurahan UCI	61,97	89,44	85,21	234,00
6	Prevalensi Penderita TBC per 100.000 penduduk	101,27	101,26	66,79	56,79
7	Prevalensi HIV/AIDS	0,0001	0,0010	0,01050	0,01245

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.2.  
JUMLAH KEMATIAN BAYI, KEMATIAN IBU DAN JUMLAH  
KELAHIRAN HIDUP DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi	147	104	102	117	70
2	Jumlah Kematian Ibu	13	12	9	12	30
3	Jumlah Kelahiran Hidup	15.458	15.458	14.192	14.376	13.249

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Dari data angka kematian bayi tahun 2017-2021 tercatat jumlah kematian bayi mengalami penurunan dari angka 147 pada tahun 2017 dan 70 pada tahun 2021. Sedangkan jumlah kelahiran hidup juga cenderung menurun yaitu di tahun 2017 yaitu 15.458 dan di tahun 2021 adalah 13.249. Menurunnya jumlah kelahiran merupakan dampak dari menurunnya *Total Fertility Rate (TFR)*.

TABEL 2.3.  
BALITA GIZI BURUK DAN BALITA STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
2018 – 2021

NO.	DATA	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa)	8.110	5.308	5.354	3.697
2	Persentase balita stunting * (%)	16,1	11,87	11,02	6,80
3	Jumlah Balita	87.577	61.186	51.974	58.449

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022)\* hasil bulan timbang bulan februari

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nganjuk, dari data tahun 2018-2021 memiliki angka balita gizi buruk yang cenderung menurun, yaitu 8.110 balita di tahun 2018 dan turun di 2021 menjadi 3.697 balita.

TABEL 2.4.  
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu Hamil	17.004	17.004	16.619	16.434	15.648
2	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kunjungan	13.578	13.381	12.950	13.247	12.451
	Cakupan (%)	79,9	78,7	77,9	80,6	79,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Dari data cakupan ibu hamil Kabupaten Nganjuk tahun 2017-2021 tercatat jumlah ibu hamil terbanyak pada tahun 2017 dengan angka 17.199 dan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan tertinggi pada

tahun 2017 dengan angka 13.578. Jumlah kehamilan setiap tahun terus menurun dan terendah pada tahun 2021 sebesar 15.648 kehamilan.

TABEL 2.5.  
DESA DENGAN CAKUPAN UCI DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan	284	284	284	284	284
2	Desa/Kelurahan Cakupan UCI	244	184	262	242	251
	Cakupan	85,9	64,8	92,3	85,2	88,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Pencapaian *Universal Child Immunization (UCI)* pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Dari data Desa dengan cakupan UCI tahun 2017-2021 terlihat pada tabel tersebut diatas. Tahun 2017 dari sejumlah 284 Desa/Kelurahan cakupan UCI yaitu 244, tahun 2018 cakupan UCI 184, pada tahun 2019 menurun menjadi 262, dan terakhir tahun 2021 yaitu 251.

TABEL 2.6.  
PREVALENSI HIV DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita HIV Yang Masih Hidup	727	149	169	113	205
2	Jumlah Penduduk	1.048.799	1.051.900	1.054.611	1.103.902	1.060.086
	Prevalensi	0,069	0,014	0,016	0,011	0,019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.7.  
PREVALENSI PENDERITA KUSTA DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Temuan Baru (PB + MB)	50	3	5	20	10
2	Jumlah Penduduk	1.048.799	1.051.900	1.054.611	1.103.902	1.060.086

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus kusta terdaftar *Pausi Basiler (PB)* maupun *Multi Basiler (MB)* pada saat tertentu per 10.000 penduduk. Di Kabupaten Nganjuk pada data Prevalensi Penderita Kusta 2017-2021 pada tahun 2017 tercatat memiliki Jumlah Temuan Baru (PB + MB) paling tinggi dengan angka 50 dari 1.048.799 penduduk.

TABEL 2.8.  
JUMLAH KASUS TB PER FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus TB	1035	564	1.028	711	682
2	Jumlah Penduduk	1.048.799	1.051.900	1.054.611	1.103.902	1.060.86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan tren menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dasar kesehatan, sehingga mampu menekan kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun bila dibandingkan dengan capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* (12 per 1000 kelahiran hidup) maka angka tersebut masih lebih kecil.

a. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ketersediaan rumah sakit diukur dari rasio jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.9.  
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

TAHUN	FASILITAS KESEHATAN						
	RS	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	TEMPAT TIDUR	BALAI PENGOBATAN	RUMAH BERSALIN	KLINIK
2017	5	20	83	148	7	2	4
2018	5	20	81	678	0	0	30
2019	5	20	82	1.023	0	0	31
2020	5	20	82	1.054	0	0	31
2021	5	20	82	887	0	0	34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

b. Jumlah Tenaga Medis

Tenaga medis di rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sangat menentukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Dimana tenaga medis merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat menerima pelayanan

kesehatan. Berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah tenaga medis pada tahun 2021:

TABEL 2.10.  
JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS TAHUN 2021

KECAMATAN	DOKTER	PERAWAT	BIDAN	FARMASI	AHLI GIZI
Sawahan	4	15	21	2	2
Ngetos	3	11	19	1	1
Berbek	3	23	36	4	0
Loceret	3	22	33	1	1
Pace	2	18	30	2	1
Tanjunganom	7	22	31	2	1
Prambon	7	22	44	2	1
Ngronggot	10	25	29	1	1
Kertosono	2	5	20	1	3
Patianrowo	4	15	26	1	1
Baron	4	15	22	2	1
Gondang	3	16	26	0	2
Sukomoro	3	20	23	1	1
Nganjuk	3	17	29	3	1
Bagor	3	11	32	1	2
Wilangan	2	17	24	0	1
Rejoso	9	32	40	3	1
Ngluyu	3	9	16	2	3
Lengkong	3	16	20	1	1
Jatikalen	4	14	25	2	2
Jumlah	82	345	546	32	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.11.  
JUMLAH TENAGA MEDIS DINAS KESEHATAN DAN RSU  
TAHUN 2021

NO.	TENAGA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	RSU NGANJUK	RSU KERTOSONO
1	Dokter Spesialis	0	34	13
2	Dokter Umum	2	17	25
3	Dokter Gigi	2	2	3
4	Apoteker	3	8	1
5	Ahli Gizi	7	13	8
6	Pembantu Ahli Gizi	0	0	0
7	Bidan	27	39	69
8	Perawat	30	273	150
9	Asisten Apoteker /SMF/Ak.F	0	21	13
10	Asisten Rontgen /APRO	0	0	0
11	Perawat Gigi	0	0	0
12	SPPH (Hygiene)	0	4	4

ds

NO.	TENAGA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	RSU NGANJUK	RSU KERTOSONO
13	Kesehatan Masyarakat (SKM)	19	3	5
14	Analisis kesehatan/pranata laboratorium Kesehatan	0	0	0
15	Fisioterapis	0	4	1
16	Rekam Medik	0	11	4
17	Tenaga Kesehatan Lainnya	120	249	122

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

### 2.1.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan sejahtera di Kabupaten Nganjuk adalah perkembangan rasio akseptor KB. Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk cukup baik. Masyarakat Kabupaten Nganjuk saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Capaian kinerja urusan keluarga berencana tersaji sebagai berikut:

TABEL 2.12.  
CAPAIAN KINERJA URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33	0,30	0,26	0,82	0,44
2. Total Fertility Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran	105,16%	106,50%	102,04%	106,38%	109,29%
3. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	97,69%	96,65%	98,32%	99,19%	98,05%
4. Persentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 21 Tahun	109,87%	117,19%	106,23%	146,81%	-
5. Persentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya ikut KB tapi belum KB ( <i>unmet need</i> )	114,25%	125,69%	122,30%	127,22%	120,97%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.2. Bidang Pendidikan

2.2.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan karena dapat meningkatkan nilai indeks pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Angka APM di Kabupaten Nganjuk di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun belakangan ini. Capaian indikator pembangunan di bidang pendidikan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 2.13.  
DATA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	JENJANG	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Murni					
	a. SD/MI	95.03	98,65	98,80	99,20	86,46
	b. SMP/MTs	97.28	92,57	94,44	96,50	78,18
2	Angka Partisipasi Kasar					
	a. SD/MI	104.86	107,34	111,18	115,20	93,65
	b. SMP/MTs	142.94	105,89	149,26	150,35	101,89
3	Angka Putus Sekolah					
	a. SD/MI	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. SMP/MTs	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angka Kelulusan Sekolah					
	a. SD/MI	100.00	99,75	100,00	100,00	100,00
	b. SMP/MTs	99.98	99,34	99,94	99,89	99,87
5	Angka Melek Huruf	93.54	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rata-rata Lama Sekolah	7.38	7,61	7,63	7,64	7,78
7	Persentase Guru Kualifikasi					
	a. SD/MI	89.38	98,20	99,82	93,45	96,29
	b. SMP/MTs	95.76	98,63	98,98	91,91	100,00
8	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72.56	63,99	106,48	120,32	88,97
9	Indeks Pendidikan	0,602	0,610	0,611	0,612	0,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan mendasar.

dh

TABEL 2.14.  
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2022
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI7 – 12	91.852	94.028	85.779	89.887	89.234
2	Jumlah Usia 7 – 12	96.657	95.318	86.821	90.612	103.203
APM SD/MI (%)		94,43	98,65	98,80	99,20	86,46
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs 13 – 15	33.932	44.420	31.477	35.374	39.737
4	Jumlah Usia 13 – 15	34.879	47.987	33.330	36.655	50.829
APM SMP/MTs (%)		79,57	92,57	94,44	96,50	78,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.15.  
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	101.356	102.310	96.532	104.385	96.649
2	Jumlah Usia 7 – 12	96.657	95.318	86.821	90.612	103.203
APK SD/MI (%)		104,86	107,34	111,18	115,20	93,65
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	49.856	50.815	49.747	55.111	51.790
4	Jumlah Usia 13 – 15	34.879	47.987	33.330	36.655	50.829
APK SMP/MTs (%)		142,94	105,89	149,26	150,35	101,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Angka putus sekolah menggambarkan jumlah siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu (*Drop Out*). Angka putus sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, angka putus sekolah tersebut berhasil ditekan hingga angka nol.

TABEL 2.16.  
JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	101.356	102.310	96.532	98.347	96.649

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah anak Putus Sekolah SD/MI	12	3	0	0	0
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	49.856	50.815	49.747	49.772	51.619
4	Jumlah anak Putus Sekolah SMP/MTs	7	0	2	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

### 2.2.2. Perpustakaan

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

TABEL 2.17.  
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 – 2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (%)	8,06	21,73	26,37	0,05	110
2. Persentase Buku Perpustakaan yang Baik (%)	8,65	12,11	10,30	15,6	78
3. Jumlah Pustakawan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang signifikan dan terjadi penurunan jumlah pengunjung ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini berbanding terbalik dengan meningkatnya persentase buku perpustakaan yang baik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk sampai saat ini belum memiliki pustakawan.

### 2.2.3. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari jumlah pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi maupun nasional, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.18.  
CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Kegiatan Pemuda Berprestasi					
a. Target (jenis kegiatan)	5	5	(*)	(*)	(*)
b. Realisasi (jenis kegiatan)	5	8	6	8	(*)
c. Capaian kinerja (%)	100	160	(*)	(*)	(*)
2. Cabang Olahraga Berprestasi					
a. Target (jenis olah raga)	2	2	10	12	16
b. Realisasi (jenis olah raga)	2	8	13	12	16
c. Capaian kinerja (%)	100	400	130	100	100
3. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif					
a. Target (%)	-	-	71	79	86
b. Realisasi (%)	-	-	75	81,25	87,5
c. Capaian kinerja (%)	-	-	105,64	102,85	101,74

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

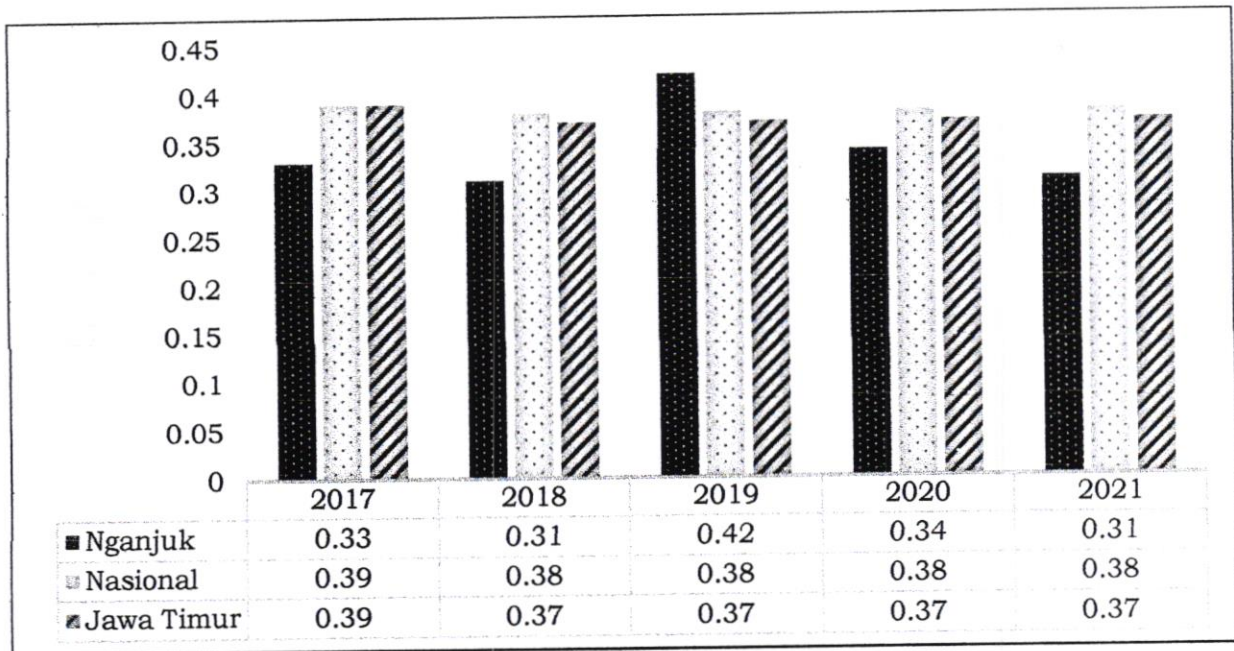
Pada tahun 2017-2021 indikator keberhasilan pembangunan pemuda diukur dengan indikator indeks pembangunan pemuda. Akan tetapi, indeks tersebut sulit diukur sehingga pada perubahan RPJMD 2018-2023 ukuran keberhasilan pembangunan pemuda diubah menjadi banyaknya pemuda yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### 2.3. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.3.1. Sosial

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini di Kabupaten Nganjuk tahun 2017 sebesar 0.33 dan pada tahun 2021 sebesar 0.31 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat Kabupaten Nganjuk rendah dan bahkan ketimpangan semakin menurun.

GRAFIK 2.3.  
INDEKS GINI KABUPATEN NGANJUK DAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Capaian kinerja urusan sosial tersaji sebagai berikut:

TABEL 2.19.  
CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL  
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 – 2021

INDIKATOR	TAHUN	
	2020	2021
Jumlah PMKS/PPKS	99.608	243.536
Jumlah PMKS/PPKS yang tertangani (orang)	99.498	241.744
Persentase PMKS/PPKS menurun	0,3%	0,4%
Persentase PSKS yang Aktif	78,61%	91,47%

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2020 mencapai 99.498 orang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 241.744 orang. Dari kinerja penanganan PPKS tersebut telah berhasil menurunkan jumlah PPKS sebesar 0,3 persen pada tahun 2020 dan 0,4 persen pada tahun 2021. Tingginya capaian penanganan PPKS ini merupakan hasil kolaborasi program dan kegiatan Dinas Sosial dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif di Kabupaten Nganjuk.

dh

2.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TABEL 2.20.  
JUMLAH KRIMINALITAS DI KABUPATEN NGANJUK MENURUT  
JENIS KELAMIN TAHUN 2021

NO.	JENIS KRIMINAL	JENIS KELAMIN	
		L	P
1	Pengroyokan	72	0
2	Pencurian dengan Pemberatan	40	0
3	Penipuan	28	7
4	Bunuh Diri	21	8
5	Pencabulan	18	0
6	Perjudian	17	0
7	Penemuan Mayat	16	3
8	Pencurian Biasa	16	0
9	Pengrusakan	16	0
10	Pencurian dengan Kekerasan	14	0
11	Pencurian Kayu	14	0
12	Penganiayaan Ringan	13	0
13	Pencurian Kendaraan Bermotor	9	1
14	Kekerasaan dalam Rumah Tangga	9	0
15	Kejahatan Senjata Tajam	6	0
16	Penganiayaan Berat	5	0
17	Penggelapan	2	0
Jumlah		244	19

Sumber: Polres Nganjuk Tahun 2022

Bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender menjadi beberapa agenda Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan berbasis gender akan merugikan perkembangan fisik maupun non fisik terhadap korban dalam mencapai generasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pencapaian SDM unggul menjadi prioritas nasional. Sehingga permasalahan berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada perempuan dan anak diantaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan *Women Crisis Center (WCC)*. Beberapa kasus kriminal yang terselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 seperti pada tabel berikut:

du

TABEL 2.21.  
JUMLAH KRIMINALITAS DI KABUPATEN NGANJUK MENURUT  
JENIS KRIMINAL TAHUN 2020 – 2021

NO.	JENIS KRIMINAL	DILAPORKAN		DISELESAIKAN	
		2020	2021	2020	2021
1	Palsu Materai	1	0	1	0
2	Pemalsuan Surat	3	1	0	1
3	Perzinahan	1	1	1	1
4	Permainan Judi/Perjudian	21	15	21	17
5	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	1	0	0
6	Pembunuhan	1	0	1	0
7	Penganiayaan Ringan	14	15	9	10
8	Penganiayaan Berat	6	14	3	5
9	Pencurian Biasa	17	18	12	12
10	Pencurian dengan Pemberatan	54	49	22	37
11	Pencurian dengan Kekerasan	11	13	5	12
12	Curanmor	63	25	13	10
13	Pengroyokan	35	54	15	51
14	Premanisme	0	32	0	31
15	Pemerasan dan Pengancaman	2	1	0	0
16	Penggelapan	9	4	5	2
17	Penipuan/Perbuatan Curang	85	59	37	35
18	Hancurkan/Merusak Barang	11	10	3	16
19	Penadahan	1	0	1	0
20	Perlindungan Anak	23	42	23	41
21	PKDRT	6	8	6	8
22	PTPPO	1	1	1	1
23	Lahgun Senpi/Handak/Sajam	2	6	2	4
24	Illegal Logging	10	16	9	14
25	Fidusia	5	0	1	0
26	Pemalsuan Produk/Merk	2	0	0	0
27	Menjual Produk Daging Palsu	4	0	0	0
28	ITE	3	3	1	1
29	UU Pokok Agraria	0	3	0	1
30	Tipikor	0	1	0	0
31	Keracunan	0	1	0	1
Jumlah		371	393	192	311

Sumber: Polres Nganjuk Tahun 2022

#### 2.4. Bidang Ekonomi

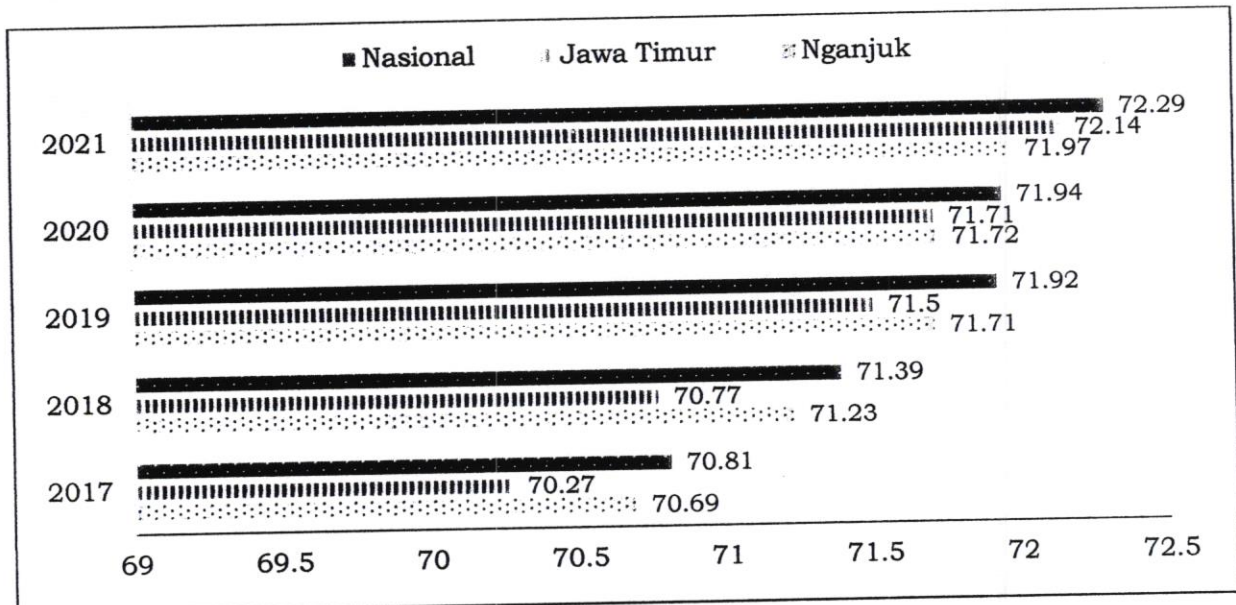
Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan.

Angka IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dengan nilai 70,69 pada

*dm*

Tahun 2021 IPM Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi sebesar 71,97. Peningkatan IPM yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GRAFIK 2.4.  
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL  
TAHUN 2017 – 2021



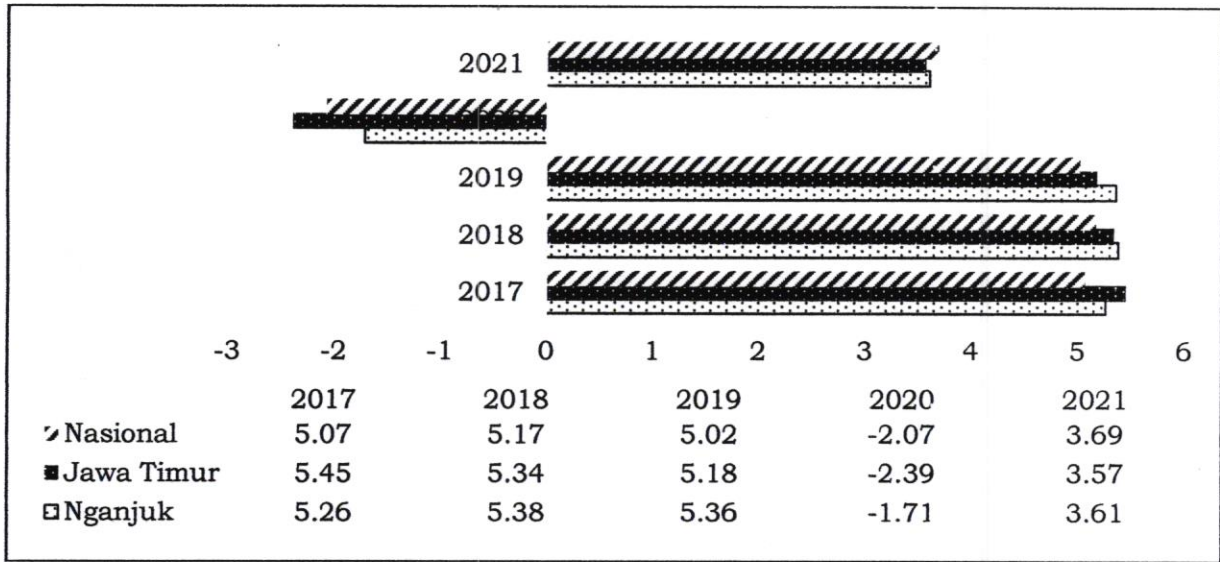
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2022

Komponen IPM dengan metode penghitungan baru terdiri dari 3 aspek yang diukur dengan 4 indikator. Aspek dan indikator tersebut adalah aspek kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, aspek pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, dan aspek ekonomi yang diukur dengan Pengeluaran Perkapita Tahun yang Disesuaikan. Metode ini berdampak pada revisi nilai IPM setiap daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Angka IPM Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2017 selalu di atas Angka IPM rata-rata Provinsi Jawa Timur. Nilai IPM Tahun 2017 adalah sebesar 70,69 di atas nilai rata rata IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 70,27. Capaian nilai IPM tahun 2021 Kabupaten Nganjuk berada dibawah nilai IPM Jawa Timur, nilai IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 71,97 dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,14.

Secara agregat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2017 hingga tahun 2021 lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2017-2021 (lihat grafik 2.5):

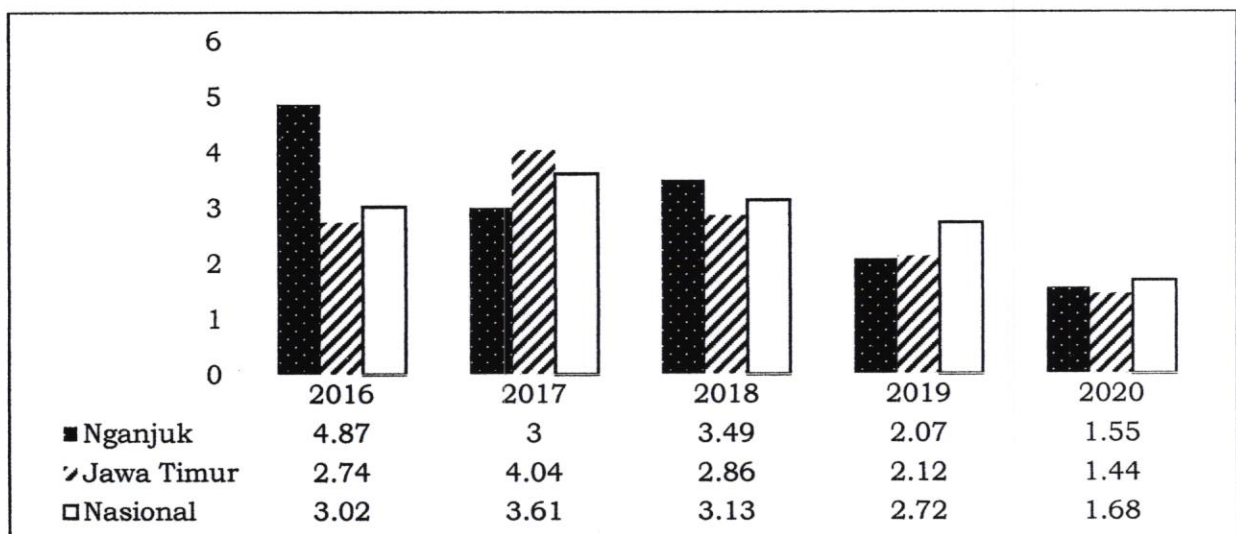
GRAFIK 2.5.  
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI  
JAWA TIMUR DAN NASIONAL  
TAHUN 2017 – 2021 (PERSEN)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Statistik empiris menunjukkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk masih cukup baik dalam lima tahun terakhir walaupun inflasi naik turun tetapi tidak sampai mengurangi kemampuan daya beli masyarakat karena nilai pertumbuhan masih lebih tinggi dari inflasi. Sejak tahun 2017 tingkat inflasi Kabupaten Nganjuk sedikit di atas rata rata inflasi Jawa Timur, tetapi lebih rendah dari rata rata inflasi nasional.

GRAFIK 2.6.  
TINGKAT INFLASI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN NASIONAL TAHUN 2016 – 2020



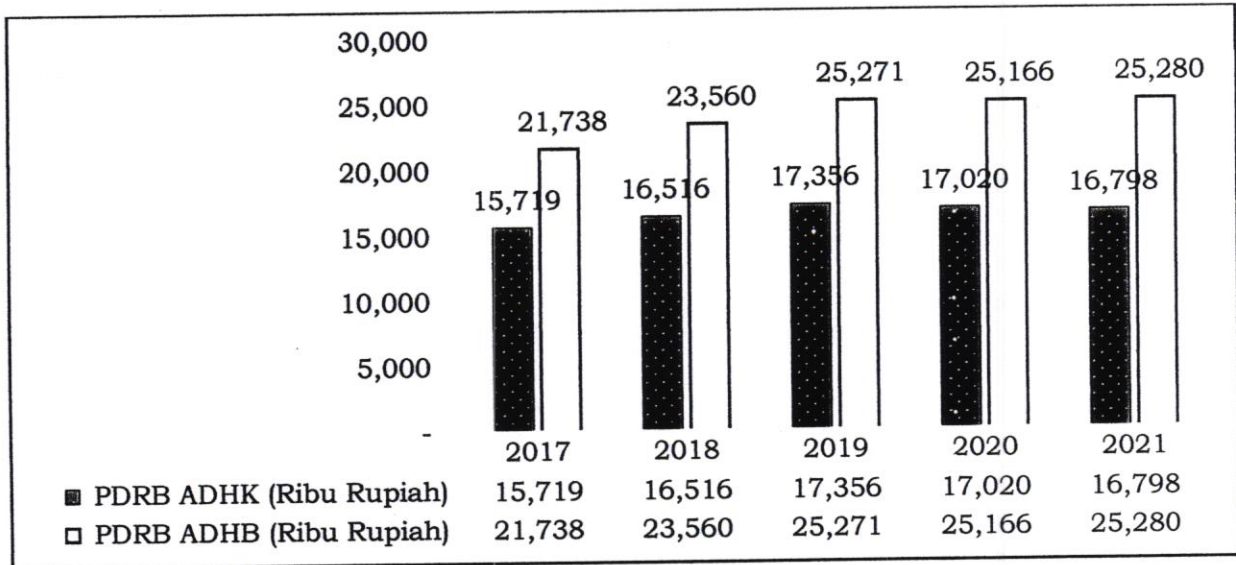
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi nilai total pendapatan regional dengan jumlah penduduk rata-rata tengah tahun. Tinggi rendahnya perkapita merupakan gambaran kasar tingkat perekonomian daerah dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Nilai

dy

pendapatan perkapita ini pada umumnya didasarkan atas pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan perkapita Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2017-2021 baik yang di hitung atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku digambarkan pada grafik 2.7 berikut.

GRAFIK 2.7.  
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021 (DALAM RIBUAN)

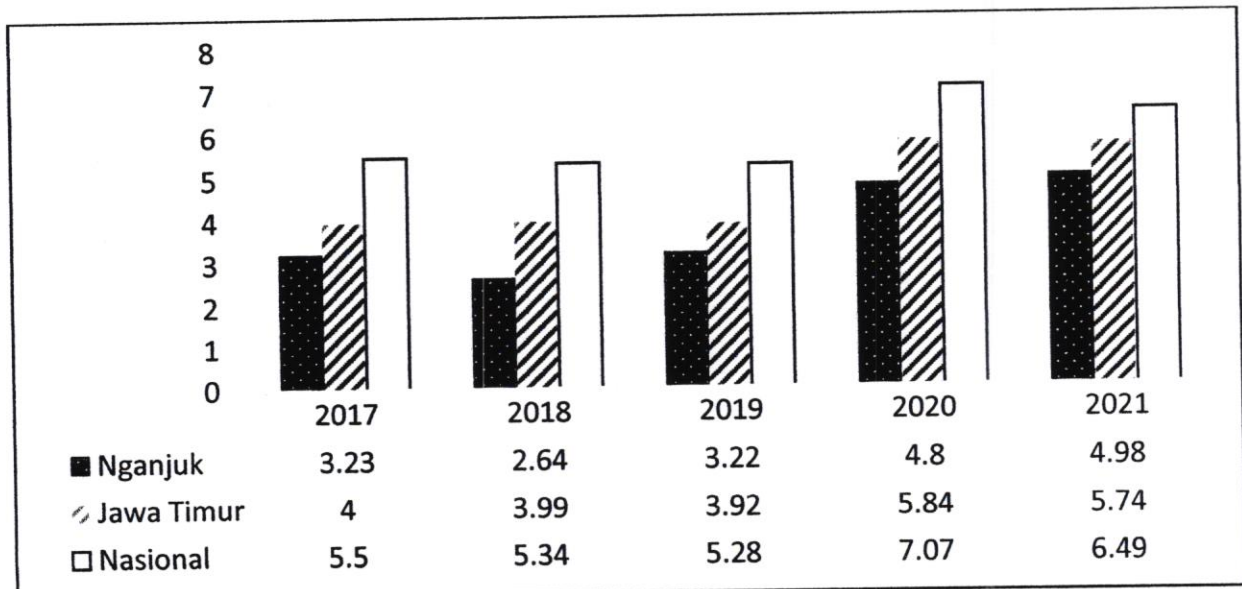


Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

### 2.5. Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perkembangan TPT di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik 2.8.

GRAFIK 2.8.  
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)  
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

ds

Peningkatan kesejahteraan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 – 2021 difokuskan pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak buruh agar dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Kebijakan yang diambil diantaranya:

- a. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap Norma Jamsostek; dan
- b. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kesehatan dan keselamatan kerja.

Kedua hal tersebut menjadi sangat penting untuk lebih meningkatkan kepedulian perusahaan terkait dengan jaminan kesehatan pekerja dan pengurangan kecelakaan kerja.

**TABEL 2.22.**  
**PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3 DAN JAMSOSTEK**  
**DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 – 2021**

NO.	DATA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan	350	353	355	358	361
2	Jumlah Perusahaan Menerapkan Jamsostek	366	341	346	352	357
3	Persentase Kepatuhan Perusahaan terhadap Norma Jamsostek (%)	96,85	97.70	98.55	99.40	99,55

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Untuk diketahui jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk trendnya terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2017 jumlah perusahaan sebanyak 350 perusahaan. Pada tahun 2021, jumlah tersebut terus meningkat sehingga menjadi 361 perusahaan. Sedangkan, untuk capaian kinerja atas perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jamsostek capaiannya lebih fluktuatif disetiap tahunnya.

**TABEL 2.23.**  
**DATA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN 2017 – 2021**

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja (Jiwa)	487.899	550.213	540.021	525.488	515.053
Pencari Kerja yang ditempatkan Menurut Pendidikan (Jiwa)	814	691	3.347	1.226	3.723
TPAK	62	67,91	66,67	65,75	61,04

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.24.  
DATA PILAH MENURUT PEKERJAAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2021

NO.	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1	Belum Tidak Bekerja	108.626	120.079
2	Mengurus Rumah Tangga	209.725	0
3	Pelajar Mahasiswa	83.271	92.950
4	Pensiunan	2.381	4.160
5	Pegawai Negeri Sipil	5.226	6.455
6	Tentara Nasional Indonesia	14	1.911
7	Kepolisian RI	81	1.429
8	Perdagangan	1.841	2.363
9	Petani Pekebun	31.792	83.745
10	Peternak	57	175
11	Nelayan Perikanan	24	49
12	Industri	32	90
13	Konstruksi	15	122
14	Transportasi	10	202
15	Karyawan Swasta	34.589	83.324
16	Karyawan BUMN	279	1.072
17	Karyawan BUMD	55	103
18	Karyawan Honorer	1.064	1.109
19	Buruh Harian Lepas	2.933	7.610
20	Buruh Tani Perkebunan	9.859	21.244
21	Buruh Nelayan Perikanan	18	37
22	Buruh Peternakan	43	85
23	Pembantu Rumah Tangga	872	16
24	Tukang Cukur	0	57
25	Tukang Listrik	2	85
26	Tukang Batu	1	1.270
27	Tukang Kayu	0	898
28	Tukang Sol Sepatu	1	20
29	Tukang Las Pandai Besi	0	205
30	Tukang Jahit	308	153
31	Tukang Gigi	0	12
32	Penata Rias	110	5
33	Penata Busana	9	3
34	Penata Rambut	30	15
35	Mekanik	1	349
36	Seniman	18	86
37	Tabib	4	17
38	Parajin	5	13
39	Perancang Busana	2	3

NO.	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
40	Penterjemah	0	3
41	Imam Mesjid	0	51
42	Pendeta	0	54
43	Pastor	0	1
44	Wartawan	10	40
45	Ustadz Mubaligh	18	109
46	Juru Masak	41	6
47	Promotor Acara	0	0
48	Anggota DPRRI	1	1
49	Anggota DPD	1	2
50	Anggota BPK	1	0
51	Presiden	0	0
52	Wakil Presiden	0	0
53	Anggota Mahkamah	0	0
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0
55	Duta Besar	1	0
56	Gubernur	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0
58	Bupati	0	1
59	Wakil Bupati	0	0
60	Walikota	0	0
61	Wakil Walikota	0	0
62	Anggota DPRD Provinsi	0	1
63	Anggota DPRD Kab/Kota	5	22
64	Dosen	177	173
65	Guru	5.230	2.306
66	Pilot	0	2
67	Pengacra	4	38
68	Notaris	7	5
69	Arsitek	3	14
70	Akuntan	0	2
71	Konsultan	3	26
72	Dokter	139	109
73	Bidan	686	0
74	Perawat	525	274
75	Apoteker	51	10
76	Psikiater	2	2
77	Penyiar Televisi	0	2
78	Penyiar Radio	8	8
79	Pelaut	1	194
80	Peneliti	5	5
81	Sopir	3	2.025
82	Pialang	0	2
83	Paranormal	2	25
84	Pedagang	3.633	4.004
85	Perangkat Desa	192	2.003

dh

NO.	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
86	Kepala Desa	24	216
87	Biarawan Biarawati	1	0
88	Wiraswasta	45.414	127.899
89	Lainnya	50	128
Jumlah Total		549.536	571.284

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nganjuk 2022

## 2.6. Bidang Infrastruktur

Kondisi fasilitas wilayah/infrastruktur mempengaruhi daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur tidak boleh menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur/ pengembangan wilayah dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Fasilitas wilayah ini antara lain: ketersediaan perbankan, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, akses telekomunikasi, serta jalan dan jembatan. Kondisi fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Nganjuk fisik digambarkan sebagai berikut:

TABEL 2.25.  
FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2019 – 2021

NO.	INDIKATOR	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Kondisi jalan Kabupaten (Km)	1.153,482	1.153,482	1.153,482
	a. Kondisi Mantap	873,440	982,923	1.004,358
	b. Rusak	596,459	170,559	149,124
2	Kondisi Jembatan (m)	661	661	661
	a. Baik	564	584	356
	b. Rusak Ringan	97	77	284
	c. Rusak Berat	-	-	21
3	Waduk Besar (Jumlah)	-	-	-
	a. Bendung/Dam (Jumlah)	123	123	123
	b. Embung (Jumlah)	-	-	-
4	Ketaatan terhadap RTRW (berdasarkan permohonan izin pemanfaatan ruang) (%)	80,16	81,36	81,44
5	Luas wilayah Industri (Ha)	41,728	26,940	-
6	Luas wilayah permukiman (Ha)	4,45	26,269	37,742

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, infrastruktur jalan dalam kondisi mantap menunjukkan peningkatan dari panjang 873,440 Km pada tahun 2019 menjadi 1.004,358 Km pada tahun 2021. Jalan dalam kondisi rusak pada

tahun 2019 sepanjang 596,459 Km berkurang menjadi 149,124 Km, jalan dalam kondisi rusak berat terus mengalami penurunan disetiap tahunnya. Kerusakan jalan disebabkan banyaknya jalan yang dilalui kendaraan angkutan material proyek-proyek di Kabupaten Nganjuk. Jembatan di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sepanjang 564 m hingga 2021 menjadi 356 m. Sama halnya dengan jembatan kondisi rusak ringan juga terus mengalami penurunan, hingga tidak ada jembatan rusak berat di tahun 2019-2021. Sedangkan luas wilayah industri, luas wilayah permukiman, luas wilayah perkotaan terus meningkat disetiap tahunnya. Untuk data capaian kinerja tahun 2016 dan 2017 menggunakan indikator kinerja lain.

Capaian kinerja urusan perumahan yang terdiri dari pemenuhan air bersih, pelayanan drainase, pemenuhan rumah layak huni, dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan perumahan yang dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL 2.26.  
CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2017 - 2021

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan Air bersih dengan sistem perpipaan (%)	100,08	101,35	106,61 (pipa + non)	108,29 (pipa + non)	119,78 (pipa+ non)
2	Persentase Sistem Air Limbah Skala Rumah Tangga/Komunitas/Kawasan/Kota	100,24	105,99	95,02	91,10	81,21
3	Persentase Pemenuhan Drainase Lingkungan	102,06	101,14	89,19	88,11	89,02
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan Lingkungan	97,896	97,93	97,43	96,14	95,96
5	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	101,07	110,45	98,09	95,89	93,68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan di tahun 2021 telah meningkatkan persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan Air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sebanyak 119,78%, Persentase ketersediaan drainase lingkungan sebesar 89,02%, Persentase rumah layak huni sebesar 93,68%, dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sebesar 95,96 pada tahun 2021.

## 2.7. Bidang Politik

Data Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan sebagai berikut:

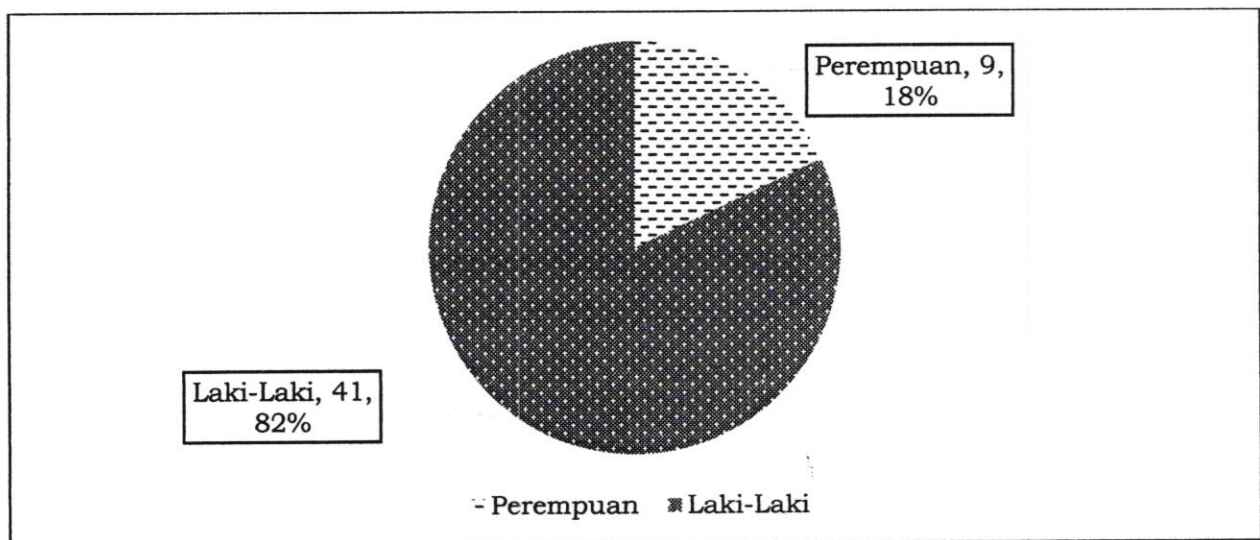
dh

TABEL 2.27.  
DATA APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	88	27	115
2	SMP	108	26	134
3	SMA	640	246	886
4	DIPLOMA	300	923	1223
5	SARJANA (S-1)	2317	3514	5831
6	SARJANA (S-2)	326	259	585
7	SARJANA (S-3)	4	-	4
	JUMLAH	3783	4995	8778

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 2022

GRAFIK 2.9.  
JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK  
MENURUT PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Berdasarkan Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perpolitikan masih sedikit yang berjumlah 18%. daripada kaum laki-laki yang lebih mendominasi (82%).

TABEL 2.28.  
JUMLAH ANGGOTA BPD KABUPATEN NGANJUK MENURUT JENIS KELAMIN  
TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Sawahan	47	18
2	Ngetos	46	19
3	Berbek	101	23
4	Loceret	123	26
5	Pace	100	22

NO.	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
6	Tanjunganom	90	18
7	Prambon	90	28
8	Ngronggot	91	20
9	Patianrowo	70	9
10	Kertosono	70	19
11	Baron	67	18
12	Gondang	82	29
13	Sukomoro	52	16
14	Nganjuk	9	3
15	Bagor	95	27
16	Wilangan	43	7
17	Rejoso	117	31
18	Ngluyu	25	7
19	Lengkong	68	20
20	Jatikalen	43	14
	Total	1429	374

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

### BAB III ISU GENDER

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nganjuk berada diatas Jawa Timur dan dibawah Nasional, meskipun tiap tahun mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,26, sedangkan pada Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, menunjukkan kenaikan sebesar 1.45 poin pada tahun 2020 sebesar 69.90 dibandingkan tahun 2019 sebesar 68.45.

#### 3.1. Permasalahan Gender

##### 3.1.1. Isu Gender Bidang Kesehatan meliputi:

Berikut ada 6 isu gender dalam bidang kesehatan, antara lain:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
2. Penanganan Stunting dan Gizi Buruk;
3. Pencegahan Penularan HIV AIDS;
4. Pencegahan/Penanganan TB;
5. Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama/Pencegahan Perkawinan Anak;
6. Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang Ramah Anak dan Disabilitas.

Permasalahan ini diatasi dengan 7 program yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah;
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah;
  - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  - b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga;

- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah;
  - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah.
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3.1.2. Isu Gender Bidang Ekonomi meliputi:

Berikut ada 5 isu gender dalam bidang ekonomi, antara lain:

1. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi;
2. Meningkatkan Jumlah Pengusaha UMKM;
3. Meningkatkan Kemandirian Perempuan Secara Ekonomi;
4. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
5. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah.
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah.
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah.
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

*dl*

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan.

5. Program Pengembangan UMKM.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan.
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar Daerah.
8. Program Pengembangan Ekspor.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah.
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri.
10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Program Pengembangan Kebudayaan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah;
  - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.
12. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.
13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
  - b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
14. Program Pemasaran Pariwisata.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.
15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kabupaten Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah.
16. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

3.1.3. Isu Gender Bidang Ketenagakerjaan meliputi:

Berikut ada 5 isu gender dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain:

1. Meningkatkan Investasi yang dapat Meningkatkan Ekonomi Secara Signifikan;
2. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Mikro dan Koperasi;
3. Melakukan Kerjasama dengan Perusahaan untuk Bursa Kerja yang Inklusif;
4. Memberikan Latihan Ketrampilan Kerja;
5. Perlindungan Tenaga Kerja.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
  - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah;
  - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
  - c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah.
3. Program Hubungan Industrial.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah.

3.1.4. Isu Gender di Bidang Politik meliputi:

Berikut ada 5 isu gender dalam bidang politik, antara lain:

1. Peningkatan Peran Perempuan dalam Ormas maupun Organisasi Politik;
2. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3. Meningkatkan Pendidikan Bela Negara;
4. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga;
5. Meningkatkan Kerukunan Masyarakat Serta antar Umat Beragama.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah;
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas DPRD;
- b. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

6. Program Kepegawaian Daerah.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

### 3.1.5. Isu Gender di Bidang Pendidikan meliputi :

Berikut ada 6 isu gender dalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Meningkatkan Rata-Rata Lama sekolah;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah;
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Sekolah;
4. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan;
5. Meningkatkan Kualitas Lulusan;
6. Pembangunan Sekolah Ramah Anak.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah.
  4. Program Pembinaan Perpustakaan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
    - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah;
    - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah.
  5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
    - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
    - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah;
    - c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
  7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
- 3.1.6. Isu Gender di Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat meliputi:  
Berikut ada 6 isu gender dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
  3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS;
  4. Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
  5. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  6. Penanganan dan Pembinaan Disabilitas.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.
3. Program Penanganan Bencana.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

4. Program Pemberdayaan Sosial.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;
  - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah.
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah;
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Daerah;
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Daerah.
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah;
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
  - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah.
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah.
8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah;
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah.
9. Program Perlindungan Khusus Anak.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah;
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah;
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.
10. Program Perlindungan Perempuan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan;
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah.

3.1.7. Isu Gender di Bidang Infrastruktur meliputi:

Berikut ada 5 isu gender dalam bidang infrastruktur, antara lain:

1. Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Konektivitas Antar Wilayah;
2. Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pengendalian Banjir;
3. Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang Ramah Anak;
4. Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Penanganan Lingkungan Kumuh dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah.
5. Program Penataan Bangunan Gedung.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Gedung Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Jalan.
8. Program Pengembangan Perumahan.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
  - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah.
9. Program Kawasan Permukiman.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
  - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah.
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah;
  - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah.
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah;
  - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah.
14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.  
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah.

### 3.3. Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu gender yang utama adalah penurunan kemiskinan. Isu penurunan kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu: a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya: biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa sebagainya; b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

BAB IV  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

4.1. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil dan merata. Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

TABEL 4.1.  
PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	PRASYARAT PUG	KETERANGAN
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis dll)
3	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , forum dan tim
4	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG
5	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
6	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Berdasarkan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender tersebut di atas, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komitmen-Komitmen Bupati Nganjuk dalam melaksanakan Pengarusutamaan PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain:
  - a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - b. Penguatan kelembagaan PUG;
  - c. Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender, disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
- b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang Efektif. Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia; dan
- b. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) dalam rumusan Visi Kabupaten Nganjuk tersebut mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju. Kemajuan juga dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan sosial yakni pendidikan yang semakin maju, derajat kesehatan yang semakin tinggi. Kabupaten Nganjuk yang maju dicerminkan dari kondisi terpenuhinya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan daerah yang maju dengan penerapan smart government yakni serangkaian sistem elektronik yang didukung teknologi informasi guna meningkatkan kinerja birokrasi serta mewujudkan pelayanan public yang berkualitas.

2. Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Gender di Kabupaten Nganjuk, tergambar dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
3. Kelembagaan-Kelembagaan PUG di Kabupaten Nganjuk ditandai dengan adanya:
  - a. Tim *Driver* Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk;
  - b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk;
  - c. *Focal Point* PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah; dan
  - d. Fasilitator PUG, yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, atau membantu percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Nganjuk.
4. *Champion* Kabupaten Nganjuk memiliki Gender *Champion*, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik itu pribadi atau pejabat, aktivis LSM atau tokoh masyarakat yang peduli. Ini terkait dengan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu juga mendorong atau memberikan kontribusi untuk pencapaian kesetaraan gender di daerah.
5. Alat analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Nganjuk adalah *Gender Analisis Pathway (GAP)*. Kegiatan yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dengan demikian analisis gender telah direspon dengan sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. Kegiatan yang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya, apakah telah sesuai sebagaimana tujuan yang diharapkan untuk mengurangi kesenjangan gender, karena anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang terjadi, apakah anggaran yang telah dialokasikan memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan.
6. Data Terpilah sebagai upaya percepatan pembangunan responsif gender, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah. Data terpilah juga sudah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
7. Partisipasi Masyarakat  
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya dapat berupa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu, ikut serta aktif dalam tahapan proses perencanaan pembangunan di kabupaten.

#### 4.2. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah

1. Tim *Driver* Kabupaten dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/226/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Penggerak (*Driver*) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Nganjuk. Adapun susunan tim *driver* ini melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Sekretariat Daerah, unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Adapun tugas tim penggerak atau tim *driver* adalah:
  - a. Memberikan bantuan layanan teknis penyusunan anggaran yang responsif gender;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG);
  - c. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG;
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG;
  - e. Meneliti dokumen PPRG sebagai lampiran didalam Dokumen Perencanaan Anggaran;
  - f. Memberikan rekomendasi dalam rangka pengarusutamaan gender; dan
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Pokja PUG ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk. Adapun tugas tim teknis PUG adalah:
  - a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa;
  - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
  - e. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
  - f. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. Memfasilitasi satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Nganjuk;
  - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi;
  - j. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk;
  - l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud kepada Bupati.
3. Tim Teknis PUG ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/475.1/K/411.401/2018 tentang Penetapan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nganjuk. Adapun tugas tim teknis PUG adalah :
  - a. Membantu tim *Driver* (penggerak) dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender;
  - b. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengarusutamaan gender; dan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender.
4. *Focal Point* PUG Di setiap Perangkat Daerah, telah dibentuk dan ditetapkan *Focal Point* PUG, yang masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Adapun tugas *Focal Point* PUG adalah:

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja;
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. Melaporkan pelaksanaan analisis Gender terhadap terhadap Kebijakan, Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  - e. Melaporkan pelaksanaan *Focal Point* Gender kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  - f. Memfasilitasi penyusunan data gender di Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Fasilitator PUG Adanya fasilitator PUG Kabupaten yang telah mengikuti "*Training of Fasilitator PUG/PPRG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*".

#### 4.3. Matriks Rencana Aksi Daerah PUG

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi daerah ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten dan OPD, yang masuk dalam RPJMD dan Renstra PD. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.

TABEL 4.2.  
Matrik Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2025

NO.	ISSUE	RENCANA AKSI		INDIKATOR		TARGET				PELAKSANA	
		PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Bidang Kesehatan										
	1.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase orang yang mendapat pelayanan UKM dan UKP		100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	2.	Penanganan Stunting dan Gizi Buruk		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Prasarana Kesehatan dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	
	3.	Pencegahan Penularan HIV AIDS		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah orang yang mendapat pelayanan UKM dan UKP		100%	100%	100%	100%	
	4.	Pencegahan / Penanganan TB		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah alat penyelenggaraan SIK terintegrasi yang tersedia		100%	100%	100%	100%	
	5.	Pendewasaan Usia Perkawinan pertama/pencegahan perkawinan anak	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase tenakes yang memenuhi standard		100%	100%	100%	100%	
	6.	Pembangunan Fasilitas kesehatan yang ramah anak dan disabilitas			Jumlah Tenakes yang memenuhi syarat untuk naik Pangkat		100%	100%	100%	100%	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis							

dl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah							
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase sediaan makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi		100%	100%	100%	100%	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah izin industri pangan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sertifikat produksi pangan IRT yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	
			Penerbitan Sertifikat Laik <i>Higiene</i> Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah sertifikat Laik <i>Higiene</i> Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	
		Program		Persentase		100%	100%	100%	100%	

ds.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		masyarakat memiliki tingkat pengetahuan baik tentang perilaku kesehatan						
			Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	100%	100%	100%	100%	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah		Jumlah UKBM, Kader Kesehatan, dan Desa Siaga dibina	100%	100%	100%	100%	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase capaian peserta KB		59,47%	60,47%	61,47%	62,47%	Dinas PPKB
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan	5160 kader	5160 kader	5160 kader	5160 kader	
			Pengendalian dan		1. Jumlah alokon	37 Faskes	37 Faskes	37 Faskes	37 Faskes	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah		yang didata dan didistribusikan 2. jumlah akseptor yang terlayani	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB		Jumlah lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	49 Kampung KB	49 Kampung KB	49 Kampung KB	49 Kampung KB	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan UPPKA		85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	
				2. Menurunnya persentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria		11,30%	11,20%	11,10%	11,00%	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5 Poktan	5 Poktan	5 Poktan	5 Poktan	
2.	Bidang Ekonomi									
	1.	Meningkatkan	Program		Persentase	16,50%	20%	23,50%	27%	Dinas Koperasi

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	peran perempuan dalam pembangunan ekonomi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Koperasi yang Diawasi							dan UMKM
2.	Meningkatkan jumlah pengusaha UMKM		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah		Jumlah Koperasi yang Diawasi	155 unit usaha	410 unit usaha	410 unit usaha	410 unit usaha		
3.	Meningkatkan Kemandirian perempuan ekonomi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		14%	15%	16%	17%		
4.	Meningkatkan usaha ekonomi produktif		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang		
5.	Mengembangkan ekonomi kreatif.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentasi koperasi yang Difasilitasi		12,50%	21%	29,50%	38%		
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah		Jumlah koperasi yang Difasilitasi	50 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan		12%	14%	16%	18%		

dm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas	-	220 Unit usaha	220 Unit usaha	220 Unit usaha	
		Program Pengembangan Umkm		Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan		16%	18%	20%	22%	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan	40 unit usaha	50 unit usaha	60 unit usaha	70 unit usaha	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase fasilitasi izin usaha perdagangan		90%	90%	90%	90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan		Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

du,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					elektronik					
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		21%	21%	21%	21%	
			Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	9 unit	11 unit	11 unit	11 unit	
			Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya		Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	33 pasar dan 11 pasar pendukung	33 pasar dan 11 pasar pendukung	33 pasar dan 11 pasar pendukung	33 pasar dan 11 pasar pendukung	
		Program Stabilisasi Harga Barana Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase pengawasan harga pokok		5,72%	5,71%	5,70%	5,69%	
			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar		Jumlah informasi harga yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Program Pengembangan Ekspor		Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran produk		80%	80%	80%	80%	
			Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	4 pelaku usaha ekspor	4 pelaku usaha ekspor	4 pelaku usaha ekspor	4 pelaku usaha ekspor	

dl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 daerah							
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran produk		58,44%	61,04%	63,64%	66,24%	
			Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			45 UMKM	47 UMKM	49 UMKM	51 UMKM	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	Dinas PMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	300 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	
		Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan		32,43%	35,14%	37,85%	40,56%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		Terkelolanya kebudayaan yang masyarakat pelakunya	95%	100%	100%	100%	
			Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	95%	95%	95%	95%	
		Program Pengembangan Kesenian		Persentase seni budaya yang dikembangkan		70,27%	72,97%	75,67%	78,37%	

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tradisional								
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		Terbinannya kesenian masyarakat	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase peningkatan jumlah wisatawan		5%	5%	5%	5%	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata		Terlaksanannya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	80%	80%	80%	80%	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata		Terlaksanannya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	90%	90%	90%	90%	
		Program Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan jumlah wisatawan		5%	5%	5%	5%	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata		Terlaksanannya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	90%	90%	90%	90%	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi		52,94%	64,70%	76,46%	88,22%	
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang		tersediannya sarana bagi insan kreatif di daerah	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah								
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing		35,70%	50%	64,30%	79%		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya kapasitas SDM pariwisata dan Ekraf	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta		
3.	Bidang Ketenagakerjaan										
	1.	Meningkatkan Investasi yang dapat meningkatkan ekonomi secara signifikan.	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan pruktivitas standard		100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
	2.	Meningkatkan pengembangan industri kecil dan mikro dan koperasi		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Menciptakan tenaga kerja mandiri	40 orang	180 orang	180 orang	180 orang		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga yang dibina	-	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga		
	3.	Melakukan kerjasama dengan Perusahaan	Program Penempatan Tenaga Kerja		Pencari Kerja yang Ditempatkan.	1.500 orang	1.850 orang	1.850 orang	1.850 orang		
				Pelayanan Antar Kerja di Daerah	Jumlah pencari kerja terdaftar yang	1.500 orang	1.850 orang	1.850 orang	1.850 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	untuk Bursa kerja yang inklusif				mendapatkan pelayanan Antar kerja yang ditindak lanjuti					
4.	Memberikan latihan ketrampilan kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan baik dalam maupun luar negeri	-	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	
5.	Perlindungan Tenaga Kerja		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah		Jumlah calon PMI yang terlindungi dan kompeten	-	90 orang	90 orang	90 orang	
	Program Hubungan Industrial			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan		85%	90%	0,9	0,9	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah	40 Orang	140 perkara dan 42 lembaga	140 perkara dan 42 lembaga	140 perkara dan 42 lembaga	
4.	Bidang Politik					85%	90%	95%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1. Peningkatan Peran perempuan dalam ormas maupun organisasi politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase jumlah peserta yang mengikuti pemantapan wawasan kebangsaan dan monev						
	2. Meningkatkan									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	keamanan dan ketertiban masyarakat		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan wawasan kebangsaan dan monev	85%	300 orang	300 orang	300 orang	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah yang dimonev		85%	90%	0,9	0,9	
			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		jumlah partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah yang dimonev	85%	10 partai	10 partai	10 partai	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan		85%	90%	90%	90%	

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ekonomi, Sosial dan Budaya		dimonev						
			Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	85%	100 orang	100 orang	100 orang	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev		85%	90%	90%	90%	
			Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	85%	90%	90%	90%	
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikn		100%	100%	100%	100%	Satpol PP
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		Jumlah Pelanggaran Perda yang diawasi dan ditangani	80%	100%	100%	100%	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten		Jumlah Pegawai yang mengikuti	100%	100%	100%	100%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perangkat DPR / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan terhadap DPRD		Baik/80	Baik/80	Baik/80	Baik/80	Sekretaris DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD guna meningkatkan Pelayanan terhadap DPRD/ IKM Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat guna Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	
		Program Kepegawaian Daerah		Nilai rata-rata capaian kinerja PNS		Baik	Baik	Baik	Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
			Kegiatan Pengadaan,		Jumlah ASN yang	19.071	8.571	8.571	8.571	

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		update data kepegawaian, jumlah pelamar, jumlah ASN yang diberhentikan dan jumlah laporan formasi.	orang	orang	orang	orang	Sumber Daya Manusia	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan pelatihan		100%	100%	100%	100%		
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi teknis	30 orang	600 orang	600 orang	600 orang		
5.	Pendidikan										Dinas Pendidikan
	1.	Meningkatkan Rata Rata Lama sekolah.	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Akreditasi minimal ≥B		96,98%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
	2.	Meningkatkan Angka Partisipasi sekolah,		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang memiliki Akreditasi minimal ≥B	578 Lembaga	605 Lembaga	605 Lembaga	605 Lembaga		
	3.	Meningkatkan sarana Prasarana Sekolah.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Akreditasi minimal ≥ B	84 Lembaga	88 Lembaga	92 Lembaga	96 Lembaga		
	4.	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Akreditasi minimal ≥ B	605 Lembaga	605 Lembaga	605 Lembaga	605 Lembaga		
	5.	Meningkatkan kualitas lulusan.		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki	18 Lembaga	27 Lembaga	27 Lembaga	27 Lembaga		
	6.	Pembangunan sekolah ramah									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	anak.				Akreditasi minimal ≥ B					
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang PAUD		1534,2	1535,2	1536,2	1537,2	
				Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar		2754,07	2755,07	2756,07	2757,07	
				Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama		1647,19	1648,19	1649,19	1650,19	
				Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		52,47	53,47	54,47	55,47	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi	87%	89%	91%	93%	

dl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		linier pada jenjang PAUD					
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi linier pada jenjang Pendidikan Dasar	95%	95%	95%	95%	
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi linier pada jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	97%	98%	99%	100%	
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		Persentase peserta didik yang dapat menggunakan bahasa daerah/lokal dengan baik dan benar		100%	100%	100%	100%	
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah		Jumlah peserta didik yang dapat berbahasa daerah dengan baik dan benar	109.700 Peserta Didik	109.700 Peserta Didik	109.700 Peserta Didik	109.700 Peserta Didik	
		Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase sarana dan prasarana perpustakaan yang		10	10	10	10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

du

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bersertifikat						
			Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah		Terlaksananya peningkatan Indeks Kegemaran Membaca	65	66	67	68	
			Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah		Jumlah kegiatan pendukung pembudayaan gemar membaca yang dilakukan	11	11	11	11	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		93%	93%	93%	93%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi		18 Cabor	20 Cabor	22 Cabor	24 Cabor	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah		Terbina serta berkembangnya potensi olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan	90%	90%	90%	90%	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah		Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah	95%	100%	100%	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Terbina dan pengembangan organisasi olahraga	90%	90%	90%	90%	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Persentase anggota Pramuka Terlatih		75%	75%	75%	75%	
			Pembinaan dan Pengembangan		Persentase organisasi	90%	90%	90%	90%	

du

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Organisasi Kepramukaan		kepemudaan yang aktif							
6.	Isu Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat											
	1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial		85%	87%	87%	87%	Dinas Sosial PPPA		
	2.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	85%	87%	87%	87%			
	3.	Penanganan Kemiskinan dan PMKS			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	85%	87%		87%	87%
	4.	Pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak anak					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau, mendapat rujukan serta terpantau dan terpelihara		85%	87%
	5.	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terwujudnya Pemeliharaan Anak Terlantar	0%			87%		87%	87%
	6.	Penanganan dan pembinaan Disabilitas			Pengelolaan Data		Terwujudnya	85%	87%		87%	87%

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fakir Miskin Cakupan Daerah		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah					
		Program Penanganan Bencana		Persentase Pelayanan PMKS		85%	87%	87%	87%	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85%	87%	87%	87%	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	0%	87%	87%	87%	
		Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PSKS yang Aktif		85%	85%	85%	85%	
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	85%	85%	85%	85%	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		Jumlah Orang, Tenaga Kesejahteraan, Keluarga, Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya serta Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Jumlah Kapasitas	85%	85%	85%	85%	
		Program		Terwujudnya		100%	100%	100%	100%	

ds

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Keadilan dan Kesetaraan Gender						
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		Terwujudnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	100%	100%	100%	100%	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan		Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	100%	100%	100%	100%	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Terlaksananya Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan		100%	100%	100%	100%	

dh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah						
				Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga		100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah		Meningkatnya Persentase Keluarga yang melaksanakan pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga	100%	100%	100%	100%	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan	Persentasi OPD yang Memanfaatkan		100%	100%	100%	100%	

*M*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Anak		Data Gender dan Anak						
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi	100%	100%	100%	100%	
					Jumlah Data Gender dan Anak Bahan Analisis dan Penyajian Data	100%	100%	100%	100%	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		100%	100%	100%	100%	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Gugus Tugas Kabupaten dan Jumlah Penguatan Kecamatan Layak Anak	100%	100%	100%	100%	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah		Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan KLA serta Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	0%	100%	100%	100%	
		Program Perlindungan Khusus Anak		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		100%	100%	100%	100%	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		Korban Kekerasan dan Eksploitasi					
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan , Eksploitasi serta penguatan Kelembagaan KLA, Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	0%	100%	100%	100%	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana dan Prasarana serta Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus	0%	100%	100%	100%	
			Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		89%	100%	100%	100%	
			Pencegahan		Jumlah Dokumen	0%	100%	100%	100%	

dy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah		Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Daerah					
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah	89%	100%	100%	100%	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Daerah		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan terhadap Kabupaten/ Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan dan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	100%	100%	100%	100%	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	0%	100%	100%	100%	
					Jumlah Sumber	0%	100%	100%	100%	

dh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					
					Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Daerah yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0%	100%	100%	100%	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	0%	100%	100%	100%	
7.	Infrastruktur					1.098.415 Jiwa	1.100.682 Jiwa	1.100.682 Jiwa	1.100.682 Jiwa	Dinas PUPR
	1. Meningkatkan infrastruktur Jalan, Jembatan dan konektivitas antar wilayah	Program Pengelolaan dan Pengeinbangan Sistem Penyediaan Air Minum		jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan						
	2. Pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	10 Unit	142 Unit	142 Unit	142 Unit	

dh.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4. 5.	Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang ramah anak  Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup  Penanganan lingkungan kumuh dan perbaikan Rumah Tidak layak Huni.		Air Minum (SPAM) di Daerah		Daerah yang di kelola dan dikembangkan					
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun dan dipelihara		20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah		Jumlah Sarana Persampahan di Daerah yang dikembangkan dan dikelola		20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Skala Rumah Tangga/Komunitas /Kawasan/Kabupaten		730.010 Jiwa	732.277 Jiwa	732.277 Jiwa	732.277 Jiwa	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah		Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah yang dikelola dan dikembangkan		100%	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Jumlah penduduk terlayani sistem Drainase		370.177 jiwa	375.906 jiwa	375.906 jiwa	375.906 jiwa	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah		Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Yang dikelola dan		15 unit	17 unit	17 unit	17 unit

dy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dikembangkan					
		Program Penataan Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Daerah dalam kondisi baik		86 unit	87 unit	87 unit	87 unit	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah , Pemberian Izin Mendirikan Gedung Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan		Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Daerah , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	86 unit	87 unit	87 unit	87 unit	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah dalam Kondisi Baik		83 kawasan	84 kawasan	84 kawasan	84 kawasan	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah dengan Baik	83 kawasan	84 kawasan	84 kawasan	84 kawasan	
		Program Penyelenggaraan Jalan		Panjang Jalan dalam kondisi Mantap Fungsional		3255 km & 611 unit	3.265 Km & 628 unit	3.265 Km & 628 unit	3.265 Km & 628 unit	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Fungsional	600 Km	600 Km	600 Km	600 Km	
		Program Pengembangan Perumahan		Persentase pengurangan backlog rumah		95%	95%	0,95	0,95	Dinas PRKPP
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

*ds*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Kabupaten		atau Relokasi Program Kabupaten					
			pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	249 unit rumah	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	
		Program Kawasan Permukiman		Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		97%	97%	97%	97%	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	97%	97%	97%	97%	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh		95%	95%	95%	95%	
			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh		jumlah unit rumah Pencegahan perumahan dan kawasan	820 unit rumah	157 unit rumah	157 unit rumah	157 unit rumah	

dy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada daerah		permukiman kumuh pada daerah					
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU		100%	100%	100%	100%	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terfasilitasinya Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	100%	100%	100%	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup		100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah		Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	100%	100%	100%	100%	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah		Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun	100%	100%	100%	100%	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		100%	100%	100%	100%	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	100%	100%	100%	100%	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau		Jumlah laporan kegiatan Pemulihan Pencemaran	-	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	

du.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kerusakan Lingkungan Hidup		dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase diklat dan penyuluhan yang diselenggarakan		100%	100%	100%	100%	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah		Jumlah diklat dan penyuluhan yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	

ds

BAB V  
PENUTUP

Demikian RAD-PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2025 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. Dengan adanya RAD-PUG ini diharapkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Nganjuk segera dapat terwujud, Sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian.

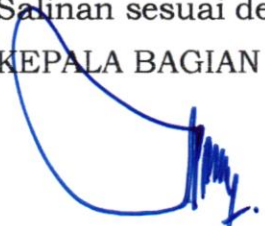
Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direviu dan disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Adanya RAD-PUG ini juga merupakan komitmen dan keseriusan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001